



## Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur)

Khofifah Khoiru Annisa<sup>1</sup>, Ulfatillah Salmi<sup>2</sup>, Sakti Sigap Prakosa<sup>3</sup>, Susi Hardjati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>4</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail addresses: [khofifahkhoiruannisa23@gmail.com](mailto:khofifahkhoiruannisa23@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 17, 2025

#### Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok

#### Keywords:

Implementation, Policy, No-Smoking Areas



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

### ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang melarang aktivitas merokok, serta kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan berbagai produk tembakau. Salah satu lokasi yang termasuk dalam KTR adalah tempat proses belajar mengajar, seperti perguruan tinggi atau universitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN "Veteran" Jawa Timur). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan pada penelitian ini adalah Civitas Akademika dan warga lainnya yang berada di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur. Hasil penelitian ini dilihat dengan teori menurut Smith dengan empat indikator yakni : 1) Kebijakan Ideal, kebijakan tersebut belum berjalan dengan semestinya, karena tidak adanya sosialisasi intensif yang dilakukan pihak kampus; 2) Kelompok Sasaran, sasaran kebijakan KTR belum mengetahui secara menyeluruh terkait kebijakan larangan merokok di kawasan tertentu sehingga masih terdapat pelanggaran kebijakan yang dilakukan; 3) Organisasi Pelaksana, dalam hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban pimpinan

yang masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan, penyediaan tempat merokok, dan penegakan aturan. Akan tetapi, untuk kewajiban berupa pemasangan tanda atau himbauan larangan merokok dan teguran sudah dilaksanakan; 4) Faktor Lingkungan, kurangnya kesadaran sosial dan budaya merokok dari kelompok sasaran juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini.

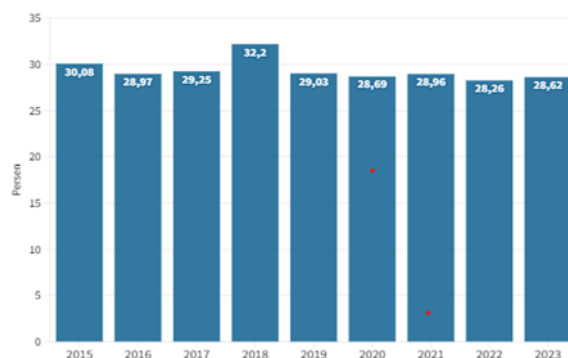
### ABSTRACT

The Smoke-Free Area (SFA) is a designated zone that prohibits smoking activities, as well as the production, sale, advertisement, or promotion of various tobacco products. One of the locations included in the SFA is educational environments, such as colleges or universities. This study employs a qualitative descriptive approach to describe and analyze the implementation of the Smoke-Free Area Policy according to Surabaya Regional Regulation Number 2 of 2019 (Case Study at UPN "Veteran" East Java). The data collection techniques used include interviews, documentation, and observation. The informants for this study consist of the academic community and other individuals within the UPN "Veteran" East Java environment. The study's findings are analyzed using Smith's theory, which is based on four indicators: 1) Ideal Policy: The policy has not been fully implemented as intended due to the lack of intensive socialization efforts by the university. 2) Target Group: The target group of the SFA policy is not fully aware of the smoking prohibition in certain areas, resulting in ongoing policy violations. 3) Implementing Organization: The responsibilities of university leaders have not been carried out optimally, especially in terms of monitoring, providing designated smoking areas, and enforcing regulations. However, efforts

such as installing no-smoking signs or advisories and issuing warnings have been implemented. 4) Environmental Factors: The lack of social awareness and the ingrained smoking culture among the target group also significantly affect the policy's implementation.

## 1. PENDAHULUAN

Merokok merupakan aktivitas yang berbahaya, tidak hanya bagi para perokok, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya yang turut terkena dampak negatifnya. Berdasarkan data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (P2PTM Kemenkes RI, 2019). menunjukkan bahwa 70 juta orang di Indonesia menjadi perokok aktif. Mirisnya, sebanyak 7,4% diantaranya merupakan kelompok usia 10 - 18 tahun yang masih tergolong anak-anak dan remaja menjadi perokok utama (Salsabilla, 2024).



**Gambar 1. Persentase Penduduk Indonesia pada Usia 15 Tahun ke Atas sebagai Perokok (2015-2023)**

Pernyataan serupa juga dapat dilihat dari data yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2015 – 2023 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia di usia 15 tahun ke atas yang merokok mengalami kenaikan dan penurunan hampir di setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan upaya dalam mengurangi bahaya yang disebabkan oleh rokok dan atau kegiatan merokok oleh perokok aktif maupun pasif, maka diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan (Supriatna, 2019). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (2) bahwa mengharuskan Pemda menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya (Pramudya, 2018). Dalam hal ini Pemkot Surabaya membuat Peraturan Daerah Kota Surabaya 2 Tahun 2019 Tanpa Rokok atau selanjutnya disebut dengan Perda KTR. Pasal 1 ayat (6) dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok menegaskan apa yang dimaksud dengan KTR, yakni “Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau”. Lebih lanjut, pada Bab III terkait Penetapan KTR Pasal 3 ayat (1) menyebutkan daerah-daerah yang menjadi KTR salah satunya yaitu tempat proses belajar mengajar. Berdasarkan kategori, perguruan tinggi atau universitas menjadi fokus lokasi utama dari KTR.

Kebijakan KTR di lingkungan UPNV Jawa Timur seharusnya sudah diterapkan, tetapi berdasarkan hasil pengamatan kondisi saat ini penerapan kebijakan KTR tersebut masih menunjukkan ketidakefektifan dalam proses implementasinya di lingkungan UPNV Jatim. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya bekas puntung rokok yang ditemukan di sekitaran Gedung Kuliah Bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis II (GKB FEB II).

Adanya temuan puntung rokok di GKB FEB II tersebut mengindikasikan bahwa masih ada orang-orang yang melanggar aturan terkait larangan merokok di KTR. Selain itu, masih adanya penjualan dan iklan-iklan produk rokok di area Kantin NKRI UPNV Jatim. Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pendalaman penelitian terkait fenomena ini dengan menggunakan model implementasi Smith dalam (Tachjan, 2006) yang mencakup empat indikator yaitu: 1) *Idealised Policy*; 2) *Target Group*; 3) *Implementing Organization*; dan 4) *Environmental Factors* dengan mengangkat judul Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur).

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Kasus di UPN "Veteran" Jawa Timur). Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, serta data sekunder yang mencakup dokumen, regulasi, berita, tulisan, atau karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik dalam mengumpulkan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini mencakup Civitas Akademika dan masyarakat di lingkungan UPNV Jawa Timur. Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Ideal (*Idealised Policy*)**

Menurut Smith, kebijakan ideal dapat dilihat dari bagaimana pola interaksi yang terbentuk antara pembuat kebijakan dengan sasaran kebijakan. Pola interaksi diharapkan dapat membuat kelompok sasaran menjadi mengetahui, memahami, dan mematuhi aturan tersebut karena dipengaruhi oleh pola interaksi yang diterapkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya membuat Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat Perda KTR yang sifatnya mengikat bagi sasaran kebijakan, khususnya di lingkungan proses tempat belajar mengajar yang merupakan salah satu KTR sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) b pada Perda KTR tersebut. Selanjutnya, pola interaksi dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pimpinan dalam mensosialisasikan kebijakan KTR di lingkungan UPNV Jatim. Harapannya adalah kebijakan ini dapat sampai kepada sasaran kebijakan dan berjalan dengan semestinya.

Namun, meskipun kebijakan tersebut jelas ada, kenyataannya menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus belum efektif. Hal ini menghambat pemahaman dan penerapan kebijakan di kalangan civitas akademika dan warga lainnya yang berada di lingkungan UPNV Jatim. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak kampus terkait kebijakan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidaktahuan yang lebih luas mengenai kewajiban dan konsekuensi dari kebijakan KTR. Sehingga masih ditemukannya orang-orang yang melakukan aktivitas merokok sembarangan, seperti mahasiswa yang masih merokok di gedung-gedung perkuliahan dan aktivitas memperjual-belikan rokok di kantin. Fenomena ini menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak diterima sepenuhnya atau kurang dipahami, karena tidak ada upaya yang cukup untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai aturan KTR itu sendiri, baik oleh pihak kampus melalui sosialisasi formal.

Secara keseluruhan, hasil wawancara mengindikasikan bahwa pola interaksi antara pimpinan UPNV Jatim dengan sasaran kebijakan, dalam hal ini civitas akademika dan pedagang kantin, belum terjalin dengan baik. Meskipun ada tanda larangan merokok di beberapa tempat, sosialisasi secara menyeluruh terkait aturan KTR, termasuk area mana yang diperbolehkan atau tidak untuk merokok, belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang masih belum mengetahui bahwa UPNV Jatim termasuk dalam KTR.

## **2. Kelompok Sasaran (*Target Groups*)**

*Target Groups* atau kelompok sasaran menurut teori Smith diharapkan dapat menyesuaikan dengan Pola-pola interaksi yang dirancang oleh pembuat kebijakan. Sasaran dari kebijakan tersebut di UPNV Jatim adalah seluruh civitas akademika yang meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik lainnya. Selain itu, petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual di kantin, serta warga lainnya yang berada di lingkungan kampus juga termasuk ke dalam *target groups*.

Berdasarkan data komposisi mahasiswa UPNV Jatim per Januari 2024, jumlah mahasiswa aktif yang terdata ada sebanyak 20.631 orang. Jumlah dosen 711 orang dan jumlah tenaga pendidik 339 orang. Apabila melihat banyaknya civitas akademika tersebut, ini menandakan bahwa *target groups* dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di UPNV Jatim cukup besar. Di sisi lain, kampus UPNV Jatim menempati lahan seluas kurang lebih 20 Ha. Banyaknya civitas akademika dan belum lagi ditambah dengan petugas keamanan, kebersihan, penjual di kantin, serta warga lainnya yang juga didukung oleh luasnya wilayah kampus sendiri menuntut adanya pengawasan yang intens dan menyeluruh untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, kebijakan ini masih belum berjalan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang menyeluruh dan belum adanya pihak yang ditugaskan secara khusus untuk menegakkan aturan KTR di lingkungan kampus. Di sisi lain, sasaran kebijakan telah berupaya untuk mengadopsi pola interaksi ideal. Meskipun belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara intens, tetapi upaya untuk menegakkan kebijakan KTR di UPNV Jatim dapat dilihat melalui adanya arahan dari pimpinan fakultas kepada petugas keamanan dan teguran lisan yang diberikan oleh dosen ke mahasiswa.

## **3. Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*)**

*Implementing organization* menurut Smith dalam (Tachjan, 2006), organisasi pelaksana adalah lembaga-lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini, berdasarkan Perda KTR Bab V Pasal 8, badan pelaksana yang bertanggung jawab adalah pimpinan dari KTR di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur (UPNV Jatim) tersebut yaitu Rektor dan/atau beserta jajarannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban ini masih belum optimal di UPNV Jatim, terutama dalam hal pengawasan, penyediaan tempat merokok, dan penegakan aturan. Akan tetapi, untuk kewajiban berupa pemasangan tanda atau petunjuk dilarang merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang mudah terlihat sudah cukup dilaksanakan dan tanggung jawab terakhir dari pimpinan adalah menerapkan teguran dan peringatan kepada seluruh orang yang melanggar ketentuan larangan merokok. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewajiban ini sudah dilakukan di tingkat fakultas meskipun masih terbatas pada teguran lisan saja dan belum ada kelanjutan proses dalam penegakkan aturannya. Misalnya, petugas keamanan sering memberikan teguran kepada mahasiswa yang merokok di area yang dilarang, serta beberapa dosen juga memberikan teguran langsung kepada mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut.

#### **4. Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*)**

*Environmental factors* menurut Smith, faktor lingkungan adalah elemen-elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti indikator budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa terdapat 2 (dua) faktor lingkungan yang mempengaruhi terkait implementasi kebijakan Perda KTR di lingkungan UPNV Jatim, yakni faktor budaya dan sosial.

Faktor budaya dari kebiasaan merokok yang sulit dihentikan. Faktor budaya yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan KTR di UPNV Jatim adalah kebiasaan merokok yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar civitas akademika. Meskipun kebijakan KTR merupakan langkah yang baik untuk mengendalikan polusi dan melindungi kesehatan, kebijakan ini tetap menghadapi tantangan besar dalam hal penerimaannya, terutama di kalangan perokok aktif.

Selain faktor budaya, faktor sosial juga berperan penting dalam pengaruh implementasi kebijakan KTR. Dalam konteks ini, faktor kesadaran individu tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menghormati hak orang lain sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa merokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif juga perokok pasif yang terpapar asap rokok. Namun, kesadaran ini masih perlu ditingkatkan di kalangan civitas akademika di UPNV Jatim. Selain itu, keberadaan penjual rokok di kantin kampus juga menjadi faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan KTR. Keberadaan penjual rokok dapat memicu dan mempertahankan kebiasaan merokok, karena memudahkan perokok aktif untuk membeli rokok kapan saja.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah penulis jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Idealised Policy* (Kebijakan Ideal)

Dalam kebijakan yang ideal perlu adanya pola interaksi yang terjalin antara pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan sasaran kebijakan KTR ini dengan tujuan agar sasaran kebijakan dapat melakukan apa yang sudah diformulasikan. Pola interaksi dapat dibentuk melalui adanya sosialisasi terkait aturan ini. Akan tetapi, pada kenyataannya menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kampus belum efektif. Hal ini menghambat pemahaman dan penerapan kebijakan tersebut, sehingga masih ditemukannya orang-orang yang merokok dan pedagang yang berjualan rokok sedangkan di kantin kampus. Seharusnya sebuah kebijakan dapat diketahui oleh semua pihak, terutama mahasiswa yang baru masuk, kenyataannya tidak ada upaya sosialisasi yang memadai. Artinya, belum ada pola interaksi yang intens dari pimpinan UPN "Veteran" Jawa Timur (UPNV Jatim) kepada civitas akademika dan warga lainnya yang ada di lingkungan kampus.

2. *Target Groups* (Kelompok Sasaran)

Respon dari kelompok sasaran dinilai sudah cukup mengetahui, tetapi tidak menyeluruh terhadap pengetahuannya terkait larangan merokok di beberapa area tertentu. Karena sasaran kebijakan dan wilayah UPNV Jatim yang cukup besar, sehingga membuat proses pengawasan tidak dapat berjalan optimal. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan penegakan aturan berupa teguran secara lisan sesuai dengan arahan dari pimpinan tingkat fakultas kepada seluruh civitas akademika dan warga lainnya untuk tidak merokok di beberapa lokasi seperti gedung perkuliahan, akan tetapi penegakan aturan tersebut masih belum efektif dikarenakan tidak adanya pengawasan dan penugasan khusus untuk menegakkan aturan tentang KTR di lingkungan UPNV Jatim.

3. *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana)

Mengacu pada pasal 8 Perda KTR, penanggung jawab atas daerah KTR di lingkungan UPNV Jatim adalah pimpinan tertinggi yaitu Rektor. Dalam hal ini, pimpinan universitas diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan KTR dilaksanakan secara efektif dengan mengacu pada empat kewajiban yang tercantum dalam Perda KTR tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan atas Perda KTR yang kemudian diterapkan di UPNV Jatim masih belum optimal, seperti dalam hal pengawasan, penyediaan tempat merokok, dan penegakan aturan. Pimpinan UPNV Jatim telah memenuhi beberapa kewajiban dalam Perda KTR, seperti melaksanakan teguran secara lisan dan memasang beberapa tanda "dilarang merokok" pada area-area tertentu utamanya gedung perkuliahan. Pelaksanaan kebijakan ini masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengawasan dan penyediaan tempat merokok. Pengawasan yang lebih intensif, penunjukan petugas khusus untuk mengawasi implementasi kebijakan, serta penyediaan area merokok yang sesuai dengan peraturan sangat diperlukan agar kebijakan KTR dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik perokok aktif maupun non-perokok. Ke depan, pimpinan perlu memperkuat komitmen politik dan meningkatkan upaya untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bebas rokok secara menyeluruh.

4. *Environmental Factor* (Faktor Lingkungan)

Faktor budaya dan sosial adalah dua faktor lingkungan yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan KTR di UPN "Veteran" Jawa Timur (UPNV Jatim ) sesuai dengan Perda Kota Surabaya tentang KTR. Terdapat kebiasaan yang sulit dihentikan yaitu merokok yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan KTR. Kebiasaan merokok ini sulit untuk diubah karena dianggap sebagai bagian dari gaya hidup dan budaya sehari-hari, sehingga adanya dilema sebagian individu untuk beradaptasi dengan aturan tersebut, karena kebiasaan merokok yang sudah lama ada dan terinternalisasi dalam kehidupan mereka. Selain itu faktor sosial terlebih pada kesadaran untuk tidak merokok sembarangan, pentingnya menjaga kesehatan dan menghormati hak orang lain sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Masih banyak ditemukan para perokok di lingkungan kampus terutama kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa merokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif namun juga perokok pasif yang terpapar asap rokok.

Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KTR di UPN "Veteran" Jawa Timur belum optimal dan masih memerlukan perbaikan dalam hal sosialisasi, pengawasan, penyediaan fasilitas untuk merokok, dan penegakkan aturan yang mendukung agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuannya. Meskipun terdapat kebijakan yang jelas dalam Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 tentang KTR, sosialisasi yang kurang efektif di kalangan civitas akademika menghambat pemahaman dan penerapan kebijakan ini. Pihak kampus belum optimal dalam menyebarkan informasi terkait KTR, sehingga banyak yang tidak tahu tentang kebijakan ini.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya perumusan dan penetapan kebijakan berupa Peraturan Rektor sebagai peraturan turunan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan yang berlokasi di Kota Surabaya.
2. Pentingnya sosialisasi kepada civitas akademika di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur akan dampak bahaya merokok, selain itu perlunya sosialisasi terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur kepada mahasiswa sejak awal masa pengenalan lingkungan kampus (Ospek).
3. Melibatkan seluruh civitas akademika dan warga lainnya yang ada di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk mematuhi, mengikuti, dan mendukung terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- P2PTM Kemenkes RI. (2019). *Apa yang dimaksud dengan Rokok?* (<https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/konsumsi-tembakau-faktor-risiko-penyakit-tidak-menular/apa-itu-rokok>)
- PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 2 TAHUN 2019 TANPA ROKOK (2019).
- Pramudya, R. (2018). *Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten/Kota*. ([https://jdih.kalteng.go.id/index.php/berita/baca/pengaturan-kawasan-tanparokok-di-kabupatenkota#:~:text=Dalam Pasal 115 ayat \(2\)menetapkan Kawasan Tanpa Rokok didaerahnya](https://jdih.kalteng.go.id/index.php/berita/baca/pengaturan-kawasan-tanparokok-di-kabupatenkota#:~:text=Dalam Pasal 115 ayat (2)menetapkan Kawasan Tanpa Rokok didaerahnya)).
- Popa, S., Popa, S. I., Dewi, F. S. T., & Trisnantoro, L. (2016). Evaluasi pelaksanaan peraturan kawasan larangan merokok pada perilaku merokok pegawai pemerintah di Boalemo, Gorontalo. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(3), 99-104. (<https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/7968>).
- Rahma, N., Yulianti, T., & Sukristyanto, A. (2018). Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(2), 1099-1105.
- Salsabilla, R. (2024). *Jumlah Perokok Aktif RI 70 Juta Orang, Didominasi Anak & Remaja*. (<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240711163644-33-553830/jumlah-perokok-aktif-ri-70-juta-orang-didominasi-anak-remaja#:~:text=Jakarta%2C CNBC Indonesia - Data Kementerian,telah mencapai 70 juta orang>).
- Supriatna, D. (2019). EVALUASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERTIB ROKOK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*.